

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

SKRIPSI



Oleh :

SURYA TRENGGANA
NPM. 0771010023

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

SKRIPSI



Oleh :

SURYA TRENGGANA
NPM. 0771010023

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011

KATA PENGANTAR

Penulis pertama – tama panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT. Tiada daya dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas Skripsi ini kecuali dari Dia yang Maha Kuasa. Tugas Skripsi ini merupakan pembelajaran dalam menempuh kuliah Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Karya tulisan dalam bentuk Skripsi ini tentulah masih menyimpan kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar belakang keilmuan yang dimiliki. Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis di kemudian hari. Karena itu, dengan harapan yang tinggi, semoga tugas Skripsi berjudul “ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA” bukanlah karya intelektual terakhir dari penulis dalam perjalanan kehidupannya.

Segala kesulitan dan hambatan dalam tugas akhir ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak disekeliling penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH, M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus dosen wali, atas segala masukan dan saran untuk penyelesaian tugas Skripsi ini.
2. Bapak H. Sutrisno, SH, M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum atas empati terhadap kondisi penulis.

3. Mas Anienda TF, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping atas segala masukan dan bantuannya meluruskan kesalahan – kesalahan penulis.
4. Bapak Panggung Handoko S.sos., S.H., M.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
5. Kepada Ayah dan Ibu kami tercinta, yang telah memberikan cintanya secara tulus, atas segala pengorbanan dan dukungannya tanpa kenal lelah.
6. Batara Citra Gumulya, SH, selaku Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Children Crisis Centre yang telah banyak membantu dalam pencarian data.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Serta Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum.
8. Para Sahabat yang telah menyisihkan waktunya Sabron, Nella, Rio, Jono dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu – satu dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur angkatan 2007 Kelas A dan seluruh pihak yang lain atas doa dan dorongan semangatnya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Untuk separuh nafasku Febrin Putri Maharani yang telah mencurahkan segenap perhatian dan waktunya untuk mendampingi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Namun, Skripsi ini tentulah masih membutuhkan kritik dan saran.

Surabaya, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Revisi	iv
Halaman Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka	
a. Tinjauan Umum Anak.....	8
b. Tinjauan Umum tentang Konsep Restorative Justice	12
1.6 Metode Penelitian	
a. Jenis Penelitian	30
b. Sumber Data	30

c. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data	31
d. Metode Analisis Data	32
1.7 Lokasi Penelitian	33
1.8 Waktu Penelitian	33
1.9 Sistematika Penulisan	33

BAB II PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

2.1 Konsep Restorative Justice Yang Digunakan Di Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Anak Berkonflik Hukum	35
2.2 Dampak Terhadap Anak Berkonflik Hukum Yang Menggunakan Konsep Restorative Justice	44

BAB III HAMBATAN DALAM PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE

3.1 Hambatan Penerapan Konsep Restorative Justice	49
3.2 Solusi Terhadap Hambatan Penerapan Konsep Restorative Justice	54

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Surya Trenggana
NPM : 0771010023
Tempat Tanggal lahir : Bangkalan, 19 Maret 1987
Program Studi : Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM DI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

ABSTRAKSI

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh telah melanggar Undang – Undang Hukum Pidana. Fenomena anak konflik hukum di masyarakat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang, dengan memberikan anggapan negatif terhadap mereka. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui penerapan konsep restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik hukum di pengadilan Negeri Surabaya dan untuk mengetahui hambatan apa saja dalam penerapan konsep restorative justice di Pengadilan Negeri Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Proses hukum formal merupakan jalan terakhir dalam menangani Anak Konflik Hukum. Dalam penanganan Anak Konflik Hukum dikenal adanya konsep Restorative Justice, yang merupakan konsep penanganan Anak Konflik Hukum dengan melibatkan semua pihak, termasuk pelaku sendiri. Dalam pendekatan Restorative Justice kejahatan bukan semata – mata masalah pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, akan tetapi juga merugikan pelaku itu sendiri. Restorative Justice merupakan paradigma yang mengedepankan upaya penanganan Anak Konflik Hukum diluar proses peradilan formal.

Kata Kunci: Anak Berkonflik Hukum, Restorative Justice

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh telah melanggar Undang – Undang Hukum Pidana.¹ Fenomena anak konflik hukum di masyarakat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang, dengan memberikan anggapan negatif terhadap mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku anak konflik hukum. Faktor yang menonjol antara lain dikarenakan gagalnya orang tua atau masyarakat dalam memenuhi keinginan anak. Kondisi ini menimbulkan kecenderungan anak memenuhi keinginan sendiri dengan cara, kemampuan, dan persepsi yang dianggap tepat baginya. Dalam penanganan anak konflik hukum sering dijumpai adanya Aparat Penegak Hukum masih kurang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dalam kaidah – kaidah perlindungan, penghargaan, pengembangan, dan pemenuhan hak anak konflik hukum.

Pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah menyetujui Rancangan Deklarasi Hak Anak yang telah ditetapkan sebagai konvensi Hak – Hak Anak. Deklarasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan bahwa masa kanak – kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan

¹ Tim Penyusun. Pedoman Umum Penanganan Anak, Surabaya : world vision, 2009. h.9

kesejahteraan anak sebagai anggota keluarga. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tersebut telah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Keppres 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak.² Dengan demikian telah mengikat masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikannya. Untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak – hak Anak Konflik Hukum di Indonesia. Telah ada Undang – Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak). Namun demikian dalam implementasinya masih banyak kendala sehingga Anak Konflik Hukum tetap mengalami nasib yang mengundang keprihatinan banyak pihak. Perjalanan panjang Deklarasi menjadi Konvensi tersebut telah menghasilkan empat prinsip yang harus diperhatikan dalam menangani persoalan – persoalan anak pada umumnya dan khusus antara lain Anak Konflik Hukum, yaitu : non diskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak mempunyai posisi yang sangat penting , baik sebagai penerus keturunan suatu keluarga maupun sebagai penerus cita – cita bangsa. Pada fitrahnya setiap anak adalah baik. Tetapi anak adalah individu yang belum matang secara fisik, mental, maupun sosial. Dibanding dengan orang dewasa, maka anak lebih rentan terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Untuk itu maka anak secara umum perlu dilindungi dari : keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan, kesewenang – wenangan

² Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung 2010, h.12

hukum, dan eksploitasi termasuk tindak kekerasan dan penelantaran diskriminasi.

Secara khusus terdapat anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diantaranya adalah anak yang mengalami masalah dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan.

Penangan Anak Konflik Hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat kompleks, kompleksitas tersebut berakibat pada penanganan yang tidak tuntas karena dilakukan tanpa didasari konsep yang terpadu, edukatif, humanis, sistemik dan partisipatif. Oleh karena itu, penanganan anak nakal seyogyanya dilakukan secara sungguh – sungguh, setuntas – tuntasnya, serta secara profesional, dan berkesinambungan tanpa mengesampingkan kaidah – kaidah yang ada.

Sejumlah konvensi dan peraturan untuk Anak Konflik Hukum sudah ditetapkan dan diberlakukan, namun demikian penyelesain Anak Konflik Hukum yang hanya melihat aspek normatif saja terbukti tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan terkesan Anak Konflik Hukum akan semakin mengalami kesulitan dalam menjalani proses hukum. Lembaga Pemasyarakatan, yang pada awal tujuannya untuk melakukan pembinaan, pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan justru menjadi tempat ‘menambah ilmu’ bagi para penghuninya sehingga, setelah keluar dari lembaga tersebut, justru bisa jadi akan melakukan kejahatan lagi.

Mengenai penanganan anak konflik hukum disebutkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang – Undang Perlindungan Anak :

“ penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir “

Proses hukum formal merupakan jalan terakhir dalam menangani Anak Konflik Hukum.³ Dalam penanganan Anak Konflik Hukum dikenal adanya konsep Restorative Justice, yang merupakan konsep penanganan Anak Konflik Hukum dengan melibatkan semua pihak, termasuk pelaku sendiri.⁴ Dalam pendekatan Restorative Justice kejahatan bukan semata – mata masalah pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, akan tetapi juga merugikan pelaku itu sendiri. Restorative Justice merupakan paradigma yang mengedepankan upaya penanganan Anak Konflik Hukum diluar proses peradilan formal. Bukan berarti menghapus kesalahan pelaku ; Justru syaratnya, ada pengakuan bersalah dari pelaku dan korban memaafkan ; Restorative Justice bisa dianggap sebagai salah satu upaya memenuhi asas hukum pidana anak tentang : “ultimatum remidium” penjara adalah langkah terburuk bagi penyelesaian Anak Konflik Hukum - ; Restorative Justice diberlakukan pada kejahatan ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian permanent.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang – undangan diantaranya

³ Ibid, 10

⁴ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2009, h.23

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembuat kebijaksanaan mulai berpikir secara jeli dan cermat sudahkan ketentuan secara internasional tentang perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan Beijing rules diratifikasi secara sempurna dalam peraturan perlindungan anak di Indonesia. Pernyataan lain yang muncul bagaimana dengan konsep restorative justice yang berkembang di beberapa negara di dunia sebagai satu konsep yang berupaya memberikan perlindungan terhadap anak.

Konsep restorative justice dapat dikembangkan di Indonesia dengan menghidupkan kembali nilai – nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “ Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya “ .

1.2 Perumusan Masalah :

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan konsep restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik hukum di pengadilan Negeri Surabaya ?
2. Hambatan apa saja dalam penerapan konsep restorative justice di Pengadilan Negeri Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan konsep restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik hukum di pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam penerapan konsep restorative justice di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana, terutama yang terkait dengan Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum

Menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

b. Manfaat Praktis

- Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat mengenai Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum.
- Untuk dapat dipakai sebagai pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penyelesaian diluar hukum formal bagi anak yang berkonflik hukum.

1.5 Kajian Pustaka

a. Tinjauan Umum Anak

1. Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai hak anak Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak Tahun 1985 dan Deklarasi Hak asasi manusia Tahun 1948.

Secara nasional definisi anak menurut perundang – undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 Tahun atau belum menikah.⁵ Ada yang mengatakan anak adalah mereka yang belum berusia 18 Tahun,⁶ Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan bahkan masih dalam kandungan,⁷ sedangkan Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁸

⁵ Ibid, 5

⁶ Ibid, 14

⁷ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2009, h. 3

⁸ Ibid, 119

Definisi anak yang ditetapkan perundang – undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama – sama menentukan seseorang masih anak – anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing – masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda – tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam. Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak – anak atau orang dewasa yaitu menurut hukum adat tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, jadi bukan asal sudah kawin saja.⁹

Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 tahun tapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia diatas 18 tahun.

Di negara Inggris definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak – anak dan dewasa. Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk

⁹ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1990. h.104

kemampuan dan kompetisi menuju pada kemandirian pada saat kedewasaan.

Di negara Skotlandia anak adalah seseorang berusia 7 tahun sampai 15 tahun sehingga seorang anak diadili dalam peradilan anak. Di Australia selatan anak usia 8 tahun sampai 18 tahun dan di Canada seseorang berumur dibawah 12 tahun.

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak di setiap negara. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Islam pasal 98 “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan¹⁰”. Menurut ahli psikologi kematangan seseorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan

¹⁰ H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2004. h. 137

tetapi sudah matang dalam berpikir. Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak – anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi ahli pidana dan psikolog dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi menurut perundang – undangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 pengertian anak yang dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.

2. Anak Berkonflik Hukum

Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang melakukan perbuatan yang dilarang di masyarakat ; dan disebut sebagai “anak nakal” ; sebagai pelaku tindak pidana, anak dipandang juga sebagai korban, setidaknya korban

salah asuhan, korban lingkungan yang tidak bersahabat, atau korban bujukan orang dewasa untuk melakukan kejahatan.¹¹

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh telah melanggar Undang – Undang Hukum Pidana.¹² Fenomena anak konflik hukum di masyarakat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang, dengan memberikan anggapan negatif terhadap mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku anak konflik hukum. Faktor yang menonjol antara lain dikarenakan gagalnya orang tua atau masyarakat dalam memenuhi keinginan anak. Kondisi ini menimbulkan kecenderungan anak memenuhi keinginan sendiri dengan cara, kemampuan, dan persepsi yang dianggap tepat baginya. Dalam penanganan anak konflik hukum sering dijumpai adanya Aparat Penegak Hukum masih kurang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dalam kaidah – kaidah perlindungan, penghargaan, pengembangan, dan pemenuhan hak anak konflik hukum.

b. Tinjauan Umum Tentang Konsep Restorative Justice

1. Pengertian Konsep Restorative Justice

Adanya beberapa persoalan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di indonesia, menuntut pentingnya dikaji pengembangan konsep restorative justice dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di indonesia. Teori yang digunakan dalam menganalisa

¹¹ Ibid, h.16

¹² Ibid, h.9

permasalahan pengembangan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Konsep restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara.¹³ Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas – jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab – sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh

¹³ Ibid, h. 180

pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan / kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Prinsip yang dipaparkan oleh Tony Marshall dan prinsip yang ditulis Susan Sharpe ini sebenarnya telah dipraktekkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara restorative justice ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan. Praktik – praktik yang ada tetap mempunyai dasar prinsip restorative justice yang telah diakui di banyak negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara. Bentuk praktik restorative justice yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan restorative justice di beberapa negara yaitu, Victim Offender Mediation (selanjutnya disingkat VOM), Conferencing / Family Group Conferencing (selanjutnya disingkat FGC), Circles dan Restorative Board / Youth Panels.

2. Sejarah Konsep Restorative Justice

Sejarah konsep restorative justice sebenarnya telah dipraktekkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara restorative justice ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

Proses restorative justice Victim Offender Mediation. Program Victim Offender Mediation pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.¹⁴ Selanjutnya proses restorative justice FGC dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Sedangkan proses restorative justice circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada dan yang terakhir proses restorative justice Restorative Board / Youth Panels program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996

3. Perkembangan Konsep Restorative Justice

Restorative justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus – menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang – undang.

¹⁴ Ibid, h.182

Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice.

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep restorative justice. Konsep restorative justice bukanlah merupakan sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut. Ketika konsep ini diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri.

Banyak versi konsep restorative justice diterima, bahwa pengadilan dapat menjatuhkan sanksi restorative sebagai ganti rugi resmi, melakukan kerja yang hasilnya untuk dana korban, atau kerja sosial dengan mempertimbangkan contoh sebagai berikut :

- 1) Korban dan masyarakat setempat tidak dipersiapkan untuk setuju pada keadaan yang tidak adil terhadap pelaku. Mediasi antara

korban dan pelaku tidak dapat dipaksakan sehingga seorang hakim hendaknya memutuskan untuk melaksanakan restorative justice.

- 2) Pelaku bisa menolak untuk menerima tindakan restorative justice yang rasional, karena korban dan masyarakat tidak dapat memaksakan hal itu. Pilihan hanya untuk hakim untuk menjatuhkan sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan juga dapat berupa restorative justice.
- 3) Ada beberapa pelanggaran yang sungguh – sungguh serius sehingga berdampak pada masyarakat lokal. Suatu intervensi publik memaksa atau sanksi oleh peradilan pidana mungkin lebih tepat sebagai rasa kekhawatiran korban dan masyarakat, sehingga aspek restorative justice tetap ada walaupun prosesnya dijalankan lembaga peradilan pidana. Isi dari sanksi yang diputuskan harus diutamakan untuk kebaikan dan penyembuhan semuanya, kalau perlu mungkin pelaku dapat ditahan, namun itu harus diberi kesempatan restorative justice. Mengapa kita tidak menyebut hasil dari restorative justice sebagai hukuman ? hal itu karena tidak ada tujuan atau maksud untuk membuat pelaku memperoleh penderitaan. Kepentingan restorative justice dan beban hanyalah sisi akibat lain dari tindakan restorative justice. Ketidakkenakan pada pelaku mungkin dan kadang merupakan konsekuensi dari kewajiban restorative justice, tapi tidak bermaksud mengakibatkan supaya menderita / luka. Restorative justice tidak melihat apa yang

menjadi perasaan pelaku, sepanjang haknya sebagai warga negara dihormati dan sebuah kontribusi yang wajar dibuat untuk menyembuhkan kerugian, penderitaan, kegelisahan masyarakat yang diakibatkan kejadian itu.

Pada awalnya mungkin pelaku tidak senang hati menerima proses restorative justice, akan tetapi dalam jangka waktu panjang pelaku dapat memahami sanksi yang diterapkan, karena sanksi yang ditetapkan lebih mudah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima masyarakat dengan cara retributive.

Sanksi restorative justice di dalam masyarakat akan menjadi pendidikan untuk masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori Republik pada peradilan pidana menurut Braithwaite dan Pettit adalah target dari sistem peradilan yaitu untuk memelihara, melindungi, mempertahankan atau untuk mengembalikan / menyembuhkan kekuasaan, memaksakan atau ancam terhadap peristiwa kejahatan.¹⁵

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Restorative justice dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor – faktor pendukung restorative justice dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap

¹⁵ Ibid, h.203

maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari restorative justice, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep restorative justice.

4. Jenis – Jenis Konsep Restorative Justice

a) Victim Offender Mediation.

Proses restorative justice yang pertama adalah VOM. Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.¹⁶ Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.¹⁷

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus

¹⁶ Ibid, 181

¹⁷ Ibid, 182

dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan comediator terhadap kasus – kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program Victim Offender Mediation.¹⁸ Pertemuan langsung secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting sepanjang perhatian yang terus menerus dari titik penyerahan, persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi. Persiapan akan selesai dalam waktu lebih kurang enam bulan dan bahkan lebih lama. Para peserta diumpamakan seperti baterai yang terpasang seri dan dirancang dengan sistem protokol untuk memfasilitasi kedatangan mereka menjalani proses penyembuhan dan penghapusan. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator menaksir kesiapan korban dan pelaku untuk bermusyawarah dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan. Banyak juga mediator yang membayar jasa staf,

¹⁸ Ibid,182

walaupun presentase mediator sukarela sudah dilatih dengan baik, harus lebih banyak dibanding yang pemula.

Victim Offender Mediation dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang yang direkrut menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh Lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka.

Tujuan dilaksanakan Victim Offender Mediation adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar – benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari Victim Offender Mediation yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberikan kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

Victim Offender Mediation berbeda dengan tipe mediator yang lain. Mediasi digunakan pada situasi konflik yang meningkat seperti perceraian dan tahanan, perselisihan masyarakat,

perselisihan bisnis, dan konflik di pengadilan sipil lainnya. Dalam situasi tersebut para pihak disebut pendebat dengan anggapan kuat mempunyai sumbangan baik terhadap kontrak yang nantinya akan ditandatangani. Mediasi dengan keadaan seperti ini sering dititikberatkan pada tercapainya sebuah pertanggungjawaban dengan sedikit perhatian terhadap akibat dari konflik tersebut terhadap kehidupan / keadaan para pihak yang terlibat. Dalam Victim Offender Mediation para pihak yang ikut tidak menjadi berdebat. Seseorang yang secara jelas melakukan sebuah kejahatan dan telah mengakui perbuatannya sehingga korban merasa dihormati. Selanjutnya isu bersalah atau tidak bersalah tidak diagendakan dalam Victim Offender Mediation, juga tidak diharapkan bahwa korban kejahatan berkompromi dan diharapkan lebih kecil dari apa yang mereka butuhkan untuk mengembalikan kerugiannya. Kalau jenis mediasi lain menitikberatkan pertanggungjawaban tapi Victim Offender Mediation mendasarinya dengan dialog dengan perhatian kepada penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan kerugian.

b) Family Group Conferencing

Family Group Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek

proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori.¹⁹ Proses ini dikenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat konsepnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan *conferencing*. Menurut terjemahan *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti, Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Eropa. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama dan pelaku utama tapi juga korban sekunder seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang – orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif

¹⁹ Ibid, 188

hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.²⁰ Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama – sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

Orang yang turut serta dalam proses FGA adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari

²⁰ Ibid, h.189

korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tata cara pelaksanaannya diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. Bila tidak dimungkinkan melalui telepon maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut.

Ada jenis conferencing lain yang bekerja dalam panduan sebuah filosofi umum yaitu mengizinkan conferencing untuk mengambil berbagai bentuk dan tata cara prosesnya tergantung budaya setempat atau harapan dari para peserta yang ikut. Sebagai sasaran dapat diwujudkan suatu sistem peradilan pidana yang berpihak kepada semua masyarakat yang terlibat dengan kejahatan tersebut. FGC dalam pelaksanaannya juga menghasilkan kepuasan yang tinggi kepada peserta. Di Amerika Serikat menurut penelitian Fercello dan Umbreit tahun 1998 lebih dari sembilan orang diantara sepuluh merasakan kepuasan dengan program conferencing yang dilakukan.²¹

c) Circles

Pelaksanaan circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang

²¹ Ibid, h.191

dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses circles ada beberapa anggota masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak.

Orang yang menjadi peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran proses sesuai dengan prinsip restorative justice dan

bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

Tata cara pelaksanaannya circles pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan circles yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan circles, semua peserta duduk melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

Keberhasilan dari circles ini adalah jika adanya kerja sama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi

semua pihak dan tanpa pemaksaan. Kekuatan masyarakat yang ikut serta dalam circles akan terjalin semakin erat melalui kepedulian secara bersama – sama mengatasi tindak pidana anak.

d) Reparative Board / Youth Panel

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim dan jaksa serta pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pesertanya yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik, lembaga yang memperhatikan masalah anak, korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa dan pengacara.

Tata cara pelaksanaannya mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang – orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan board terhadap pelaku berakhir.²²

²² Ibid, h.195

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.²³

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data-data penelitian.²⁴ Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah :

- a) Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya.
- b) Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang – undangan antara lain UU No. 23

²³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 30

²⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 98

²⁵ Ibid, h. 106

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, encyclopedia, dan lain-lain.

c. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

- a) Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu secara wawancara kepada pihak terkait yang dalam hal ini yaitu kepala panitera muda pidana dan hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya, wawancara tersebut menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi oleh hakim dalam proses persidangan atas terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum.
- b) Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka yaitu dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau

²⁶ Ibrahim Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, PT. Bayu Media Publishing, 2010, h. 296

keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.²⁷ Dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁸

Pengkajian deskriptif analitis digunakan untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (dogmatik) yaitu untuk menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah.²⁹

²⁷ Ibid, h. 297

²⁸ Ibid, h. 107.

²⁹ Ibid, h. 36.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Kantor Pengadilan Negeri Surabaya, yang beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 16 – 18 Surabaya.

1.8 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juli 2011. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, pengajuan judul (Pra Proposal), Acc Judul dan penentuan Dosen pembimbing, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan proposal penelitian, penulisan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri beberapa sub-sub :

Bab Pertama pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab Kedua, menguraikan tentang pelaksanaan restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik hukum di pengadilan Negeri Surabaya. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu, pertama mengenai konsep restorative justice yang digunakan di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap anak berkonflik hukum. Kedua, mengenai dampak terhadap anak berkonflik hukum yang menggunakan konsep restorative justice.

Bab Ketiga, menguraikan tentang Hambatan dalam penerapan konsep restorative justice di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu, pertama hal – hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan konsep restorative justice terhadap anak berkonflik hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua, solusi terhadap hambatan penerapan konsep restorative justice.

Bab Keempat, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.